



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

Ponikem binti Darmijo, umur 52 (tempat / tanggal lahir, Purworejo, 8 November 1960), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kreatif, KM. 110, RT.04, RW. 02, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 07 Desember 2018 di bawah register perkara Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Basirun bin Dimin** yang beridentitas :-----

Nama	: Lia Ariyanti binti Basirun -----
Tanggal lahir	: 18 Oktober 2004 (umur 14 tahun, 1 bulan)-----
Agama	: Islam-----
Pekerjaan	: tidak bekerja-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Kreatif, KM. 110, RT.04, RW. 02, Desa
Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten
Kutai Timur.-----

dengan calon suaminya :-----

Nama : **Agus M. Sukir bin Sutriyono**-----

Umur : 23 tahun. -----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : petani.-----

Tempat kediaman di : Jalan Kreatif, KM. 110, RT.01, RW. 01, Desa
Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten
Kutai Timur.-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur;-----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.082/KUA.16.08.3/PW.01/X/2018;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----

Hal. 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Lia Ariyanti binti Basirun** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama **Agus M. Sukir bin Sutriyono**.-----
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut : -----

1. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.081/KUA.16.08.03/PW.01/X/2018, tertanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Penolakan Nikah Nomor B.082/KUA.16.08.3/PW.01/X/2018, tertanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 11 Bengalon tertanggal 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; -----

Hal. 3 dari 8 halaman



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408022411100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tanggal 12 September 2012 Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Lia Ariyanti binti Basirun dengan Agus M. Sukir bin Sutriyono menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Lia Ariyanti binti Basirun yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan P.2 (Surat Penolakan Nikah) yang merupakan asli surat bukti serta bukti P.3 (Fotokopi Ijazah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari asli surat bukti;-----

Hal. 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan P.2 (Surat Penolakan Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bengalon yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P.3, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Bengalon, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P.4, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Lia Ariyanti binti Basirun, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004. Oleh karena bukti P.3 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama Lia Ariyanti binti Basirun, terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Lia Ariyanti binti Basirun, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama Lia Ariyanti binti Basirun tersebut, masih berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;---

Hal. 6 dari 8 halaman



Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";-----

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan Lia Ariyanti binti Basirun, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Lia Ariyanti binti Basirun untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Agus M. Sukir bin Sutriyono;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy-Syafi'i. S.Ag sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I serta Adi Martha Putera, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ttd

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

H. Ahmad Asy Syafi'i. S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)